

NASIB PEDAGANG KAKI LIMA SAAT PANDEMI COVID 19

Siti Aminah

Dosen Manajemen FEB UPN V Jawa Timur

Abstraksi

Pada saat pandemic sejak tahun 2020 -2021 nasib pedagang kaki lima sangat menggenaskan karena daya beli masyarakat mengalami penurunan karena penurunan pendapat mereka krena pembatasan karyawan atau PHK,terutama buruh pabrik karyawan perhotelan akryawa perusahaan swasta baik kecil mapun besar

Banyak para pedaganag kehilangan mata pencaharian. Penutupan lokasi jualan atau sepi nya pembeli menjadi sebab banyak pedagang yang terpaksa harus berhenti berjualan.

Contoh seperti yang dialami Puji Rahayu, salah seorang penjual makanan di Purbalingga Food Center (PFC). Sehari-hari, wanita berusia 30 tahun itu menjajakan opor, namun sejak Covid-19 mewabah sehingga PFC ditutup membuat Puji terpaksa beralih profesi menjadi penjual es batu di rumahnya.

Kata kunci Covid 19, Penerimaan

Pendahuluan

Pada tataran ekonomi global, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara-bangsa dan keberadaan UMKM. Laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. Jika hal ini berlanjut, OECD memprediksi akan terjadi penurunan tingkat *output* antara seperlima hingga seperempat di banyak negara, dengan pengeluaran konsumen berpotensi turun sekitar sepertiga. Prediksi ini tentu mengancam juga perekonomian nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan UMKM di masa Pandemi Covid-19. Populasi pada penelitian ini adalah 50 pedagang kaki lima di Desa Bantar Jaya Bogor. penelitian ini menggunakan angket untuk pengumpulan data. Sedangkan analisis faktor yang digunakan

adalah *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) dengan bantuan aplikasi SPSS 26. Hasil analisis faktor menyatakan dalam penelitian ini ditemukan 10 faktor yang mempengaruhi pendapatan UMKM di masa pandemic Covid-19. Faktor tersebut adalah (a) Faktor Social Distancing (b) Faktor PSBB (c) Faktor Bahan Baku (d) Faktor Penjualan (e) Faktor Teknologi (f) Faktor Bantuan Dana (g) Faktor Influencer (h) Faktor Perbankan (i) Faktor Konsumsi (j) Faktor Kebijakan Struktural.

Landasan Teori

1. Pedagang kaki lima atau disingkat PKL

adalah istilah untuk menyebut penaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk [pejalan kaki](#) (*pedestrian*)

Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan [gerobak](#). Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah [kaki](#) pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu).

Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang 'mangkal' secara statis di trotoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan).

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial [Belanda](#). Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun

hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter.^[1]

Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya di sekitar rumah mereka.

Metodologi

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa keterangan dari sumber interment dan kemudian diolah oleh peneliti dan disimplkan dengan metode kwalitatis kemudian diolah dan disimpullkan

Hasil Penelitian dan Pembahasan

semenjak korona. Saat ini saya hanya jualan es batu saja di rumah. Suami saya kebetulan di Bandung, tapi kan nggak bisa pulang sudah 5 bulan,” tutur Puji.

Nasib serupa dialami oleh Deni Hamdani (32), pedagang asal Kemangkong yang qbiasa berjualan di PFC. Sejak merebaknya virus Corona di Purbalingga dan PFC ditutup, Deni tak lagi mempunyai penghasilan. Karenanya, Deni berharap pandemi Covid-19 segera berakhir, jumlah korban yang jatuh pun berkuang, dan masyarakat makin disiplin menaati anjuran pemerintah.

Kondisi kedua pedagang tersebut dan para pedagang lainnya tak luput dari perhatian pemerintah. Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, menyatakan para pedagang kaki lima merupakan salah satu kelompok masyarakat terdampak pandemi Covid-19, dan layak untuk memperoleh bantuan.

“Pedagang kaki lima yang ada di lingkungan wilayah kota, mereka merupakan salah satu masyarakat yang terdampak karena omzet mereka sudah barang tentu mengalami penurunan yang drastis dengan adanya pandemi Covid-19,” kata Tiwi saat menyerahkan bantuan sembako kepada para pedagang di halaman pendopo Dipokusumo, Jumat pagi (8/5/2020).

Adanya penurunan omzet para pedagang diakui oleh Kepala Unit Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia, Kunto Hari Wibowo. Bahkan, ada pedagang yang terpaksa mengalami penurunan omzet hingga 50 persen.

“Dan memang berdasarkan survei dari Bank Indonesia, UMKM sangat terpuuk dengan kondisi seperti ini. Bahkan dari beberapa survei ada sejumlah PKL yang mengalami penurunan omzet sampai 50%,” jelasnya saat penyerahan bantuan bersama Bupati Tiwi.

Bantuan yang diberikan adalah hasil kerja sama Pemkab Purbalingga dengan Bank Indonesia. Bantuan berupa 569 paket sembako tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak korona.

“Kemarin dengan pimpinan sudah menyerahkan bantuan ini, langsung kepada bupati. Hari ini oleh pemda Purbalingga langsung

kehilangan mata pencaharian. Penutupan lokasi jualan atau sepi pembeli menjadi sebab banyak pedagang yang terpaksa harus berhenti berjualan.

Seperti yang dialami Puji Rahayu, salah seorang penjual makanan di Purbalingga Food Center (PFC). Sehari-hari, wanita berusia 30 tahun itu menjajakan opor, namun sejak Covid-19 mewabah sehingga PFC ditutup membuat Puji terpaksa beralih profesi menjadi penjual es batu di rumahnya.

“Saya tidak pernah (lagi) jualan opor di PFC semenjak korona. Saat ini saya hanya jualan es batu saja di rumah. Suami saya kebetulan di Bandung, tapi kan nggak bisa pulang sudah 5 bulan,” tutur Puji.

Nasib serupa dialami oleh Deni Hamdani (32), pedagang asal Kemangkong yang biasa berjualan di PFC. Sejak merebaknya virus Corona di Purbalingga dan PFC ditutup, Deni tak lagi mempunyai penghasilan. Karenanya, Deni berharap pandemi Covid-19 segera berakhir, jumlah korban yang jatuh pun berkuang, dan masyarakat makin disiplin menaati anjuran pemerintah.

Kondisi kedua pedagang tersebut dan para pedagang lainnya tak luput dari perhatian pemerintah. Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, menyatakan para pedagang kaki lima merupakan salah satu kelompok masyarakat terdampak pandemi Covid-19, dan layak untuk memperoleh bantuan.

“Pedagang kaki lima yang ada di lingkungan wilayah kota, mereka merupakan salah satu masyarakat yang terdampak karena omzet mereka sudah barang tentu mengalami penurunan yang drastis dengan adanya pandemi Covid-19,” kata Tiwi saat menyerahkan bantuan sembako kepada para pedagang di halaman pendopo Dipokusumo, Jumat pagi (8/5/2020).

Adanya penurunan omzet para pedagang diakui oleh Kepala Unit Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia, Kunto Hari Wibowo. Bahkan, ada pedagang yang terpaksa mengalami penurunan omzet hingga 50 persen.

“Dan memang berdasarkan survei dari Bank Indonesia, UMKM sangat terpuuk dengan kondisi seperti ini. Bahkan dari beberapa survei ada sejumlah PKL yang mengalami

penurunan omset sampai 50%,” jelasnya saat penyerahan bantuan bersama Bupati Tiwi.

Bantuan yang diberikan adalah hasil kerja sama Pemkab Purbalingga dengan Bank Indonesia. Bantuan berupa 569 paket sembako tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak korona.

“Kemarin dengan pimpinan sudah menyerahkan bantuan ini, langsung kepada bupati. Hari ini oleh pemda Purbalingga langsung

Kesimpulan

Hampir separuh lebih penduduk dari Indonesia bekerja di sektor informal. Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri mencatat hingga tahun 2019 diketahui sebanyak 55,72% dari masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal dan 39.01% diantaranya berada di DKI Jakarta. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai sektor informal sering kali kurang diperhatikan oleh pemerintah secara baik.

tersebut terindikasi dari adanya perlakuan tidak adil melalui stigma yang diberikan kepada PKL sebagai “perusak” estetika perkotaan. Di tengah ketidakadilan yang ada, kini para PKL juga dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang mengharuskan mereka untuk melakukan karantina di rumah selama beberapa hari seiring dengan adanya kebijakan PSBB. Hal tersebut berpengaruh banyak terhadap penghasilan mereka, mengingat bahwa PKL merupakan pekerjaan berbasis harian sehingga jika para PKL tidak berjualan keluar rumah maka tidak ada penghasilan yang didapatkan.

Argumen tersebut diperkuat melalui penelitian yang telah dilakukan oleh Raihana P. Hutami Researcher dari komunitas Rame-Rame Jakarta, sebagai pegiat independen yang bergerak dalam isu-isu informal Jakarta menjelaskan bahwa PKL yang berjualan di wilayah perkantoran mengalami penurunan pendapatan hingga 50%, sedangkan pedagang yang berjualan di wilayah permukiman mengalami pendapatan hingga 100%. Studi ini dilakukan di area perkantoran Karet

Selain itu, baik pedagang yang berjualan menetap maupun yang berpindah-pindah mengalami penurunan hingga 50%, bahkan tidak mendapatkan penghasilan selama 3 bulan, pada masa PSBB diterapkan. Temuan tersebut didorong melalui adanya kebijakan *Work From Home* (WFH) yang dikeluarkan oleh beberapa tempat kerja yang mengakibatkan adanya peralihan sasaran konsumsi dari pedagang kaki lima di area perkantoran ke pedagang yang ada di wilayah perumahan.

Setelah kebijakan PSBB transisi diterapkan, para pedagang yang menetap mendapatkan penambahan pendapatan sebanyak 20% dikarenakan masih

banyak pekerja kantoran yang membawa bekal sendiri untuk menghindari warung makan, serta pekerja yang WFH. Para pedagang tersebut kemudian mencari cara untuk memasarkan produknya melalui penjualan berbasis daring. Di samping itu, para pedagang yang berpindah-pindah masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan pemasukan karena tidak dapat berjualan baik secara daring maupun luring. Sehingga strategi yang dapat dilakukan adalah melalui jemput bola atau mendatangi wilayah yang ramai.

Rujak Center for Urban Studies bekerja sama dengan beberapa lembaga sipil membuat survei kondisi di Indonesia dan membuka layanan pengaduan independen mengenai isu hak atas ekonomi dan sosial. “Berdasarkan hasil pengaduan diketahui bahwa banyak pekerja dari sektor informal yang mengeluhkan mengenai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pendapatannya menurun. Selain kebutuhan sehari-hari, banyak juga yang mengeluhkan karena tidak mampu membayar biaya sewa tempat tinggal. ‘Tutur Elisa Sutanudjaja Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies

Di samping itu, RCUS juga tergabung ke dalam Laporan Covid-19 yang bekerja sama dengan Social Resiliency Lab, Nanyang Technology University mengenai *Risk Perception Survey* atau Survei Persepsi Resiko. Berdasarkan hasil survei tersebut dapat dilihat persepsi resiko berdasarkan jenis pekerjaannya. Secara total, diketahui bahwa sebanyak 81% dari total responden mengatakan bahwa faktor ekonomi menduduki urgensi yang sama dengan faktor kesehatan.

Jika ditinjau dari keadaan para PKL, tentunya pilihan antara berjualan atau melakukan karantina mandiri merupakan pilihan yang amat sulit. Kedua pilihan tersebut mengarahkan kepada pilihan antara “mati karena kelaparan atau mati karena tertular”. Hal tersebut dikarenakan jika diam di rumah maka mereka tidak mendapatkan penghasilan. Dengan tidak adanya penghasilan yang masuk mengakibatkan kondisi para PKL semakin terjepit ditekan oleh biaya kebutuhan sehari-hari, biaya sewa, biaya kebutuhan sekunder, dan lainnya.

Referensi

Ariyadi Wahyu Eko. 2005. Kajian Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tumbuhnya Pedagang Kaki Lima Pada Suatu Kawasan Monumen Perjuangan 45 Banjarsari Surakarta

. Jurnal ekonomi UGM Vol 12 No 3. Yogyakarta Becker F. Kristina. 1991. Sektor Informal di Tanzania.

Jurnal International . Tanzania Colin C Williams, Anjula Gurtoo. 2011. Pengusaha Perempuan Sektor Informal di India. Jurnal International, Vol 3, No 1. India

1. ^ *""Katanye" Kota Kaki Lima". Departemen Pekerjaan Umum PU-Net. Diarsipkan dari [versi asli](#) tanggal 2006-11-13. Diakses tanggal 13 Desember.*